

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Taiwan dan Republik Rakyat China (RRC) memiliki hubungan yang sangat rumit dan sampai saat ini pun hubungan antara Taiwan dan RRC ini relatif mengalami pasang surut. Hal ini diakibatkan karena perang saudara di dataran China yang terjadi antara Partai Nasionalis atau KuoMinTang (KMT) yang pada saat itu dipimpin oleh Chiang Kai Shek dengan Partai Komunis China (PKC) yang dipimpin oleh Mao Zedong. Akibat adanya perbedaan ideologi antara kedua partai ini yang kemudian menyebabkan meletusnya Perang Sipil China atau biasa dikenal dengan perang saudara China pada sekitar tahun 1945 sampai pada tahun 1949. Meskipun begitu perang saudara ini tidak sepenuhnya berakhir, ini dapat kita lihat dan rasakan dimana adanya ketegangan-ketegangan hubungan antara Taiwan dan RRC sampai saat ini.

Konflik yang terjadi antara Taiwan dan RRC ini dimulai pada masa pasca perang dingin sampai pada pecahnya perang saudara antara Partai Nasionalis dengan Partai Komunis China (PKC) tahun 1945-1949. Perang ini mengakibatkan kekalahan Partai Nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek yang kemudian mundur ke Taiwan dan mendirikan pemerintahan sementara *Republic of China* (ROC) dengan harapan suatu saat nanti akan kembali untuk merebut kembali pemerintahan di China daratan.

Jika dilihat dari kronologi sejarahnya, sebelum China dikuasai oleh Partai Nasionalis dan Partai Komunis, China memiliki sistem pemerintahan monarki yang dipimpin di bawah kekaisaran Manchu (Wicaksono, 2014). Dr. Sun Yat-sen yang merupakan revolusioner China memimpin revolusi yang menjatuhkan kekaisaran Manchu yang telah berkuasa selama kurang lebih 267 tahun yang dikenal sebagai Revolusi China atau Revolusi Xinhai yang dimulai pada tahun 1911 dan berakhir ketika Kaisar Puyi atau yang juga dikenal sebagai *the last emperor* turun takhta

pada tahun 1912. Revolusi inilah yang menandakan secara resmi berakhirnya sistem pemerintahan kekaisaran China yang berkuasa selama kurang lebih 2000 tahun lamanya dan digantikan dengan pemerintahan republik hal ini juga membuktikan bahwa kekaisaran Dinasti Qing sudah tidak mampu untuk dapat mengangkat kembali kejayaan China.

Ketidakmampuan Kaisar dalam memerintah negara yang kemudian menyebabkan rakyat mengalami penderitaan yang terus menerus diikuti dengan kekalahan perang dengan negara barat juga membuat menguatnya dominasi asing yang mengakibatkan terjadinya perang candu I, perang candu II, invasi dari Jepang, masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme dan liberalisme serta pemberontakan-pemberontakan lain yang terjadi secara domestik seperti pemberontakan Taiping (1850-1864), pemberontakan Nian (1853-1868), pemberontakan Panthay (1855-1873) dan Gerakan Boxer (1900-1901) (Rhodas, 2000).

Akibat adanya pergantian pemerintahan di China ini yang mana juga membuat masuknya paham komunisme yang kemudian paham ini berkembang semakin pesat dan terjalinnya hubungan antara China dan Uni Soviet (Clegg, 1947). Hal ini juga menyebabkan timbulnya kekhawatiran dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Kemudian Amerika mengirimkan John Marshall sebagai diplomat untuk melakukan mediasi antar kedua partai dan mengusahakan agar China tidak jatuh ke tangan komunis (Wint, 1958). Ketika pasca meninggalnya Dr. Sun Yat-sen pada tahun 1925, kekuasaan partai nasionalis dipegang oleh Chiang Kai Shek yang mulai membantai kaum komunis dikarenakan Chiang Kai Shek beranggapan bahwa paham komunis ini akan membahayakan persatuan negara China dan juga partai nasionalis. Sehingga kemudian partai komunis mendirikan partai baru yang dikenal dengan sebutan Partai Komunis China (PKC) atau Kungchantang yang dipimpin oleh Mao Zedong dan menjadi ancaman terbesar partai nasionalis yang mengakibatkan kedua partai ini saling bertikai satu sama lainnya.

Perseteruan antara partai nasionalis dan partai komunis menyebabkan peperangan saudara yang tidak dapat dihentikan. Dalam perang saudara yang terjadi

setelah perang dunia kedua, tentara partai nasionalis terus mengalami kekalahan. Sehingga akhirnya pada tahun 1949 kekalahan besar partai nasionalis terhadap partai komunis ini menyebabkan partai nasionalis terdesak dan menarik diri dari daratan China yang kemudian mundur ke Taiwan, sebuah kepulauan yang juga dikenal dengan nama Formosa. Pulau ini terletak di perairan pantai tenggara China diantara Laut China Selatan dan Timur dan terletak di Asia Timur dan diapit oleh Selat Taiwan dan Laut Filipina (Taiwan Central Intelligence Agency). Partai nasionalis mendirikan pemerintahan sementara yang diberi nama *Republic of China* sedangkan partai komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong mendeklarasikan terbentuknya Republik Rakyat China (RRC) atau *People's Republic of China* (PRC) pada 1 Oktober 1949. Semenjak saat itulah persoalan pengakuan negara China dari dunia internasional pun terbagi menjadi dua.

Pada tahun 1949-1971 perwakilan China di kursi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) direpresentasikan oleh Taiwan akan tetapi pada tahun 1971 digelarnya Sidang Majelis Nasional PBB yang kemudian lahirnya Resolusi 2758 Yang mengatur tentang pemulihan hak-hak RRC dan ini juga berarti Taiwan kehilangan haknya sebagai perwakilan China yang sah di PBB. Akan tetapi resolusi ini juga tidak menyatakan bahwa Taiwan merupakan bagian dari negara RRC maupun memberikan hak perwakilan Taiwan kepada RRC.¹ Kehilangannya hak di PBB memiliki dampak yang besar bagi Taiwan yang mana kemudian banyak negara yang mulai mengakui RRC dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan karena adanya tekanan politik dari RRC.

Berkurangnya pengakuan internasional dan juga organisasi internasional membuat Taiwan kesulitan untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, menjalin hubungan kerja sama dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Taiwan yang sekarang ini memiliki status yang unik ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai negara karena memiliki atau memenuhi syarat-syarat definisi negara sebagai pribadi hukum internasional yaitu memiliki wilayah dengan batas-batas yang diakui oleh dunia internasional,

¹ The United Nations General Assembly Resolution 2758,
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_2758

memiliki pemerintahan, memiliki penduduk tetap atau memiliki masyarakat yang tinggal di dalam wilayah tersebut secara terus menerus, dan adanya pengakuan dari negara-negara lain atau pengakuan dari dunia internasional (Starke, 2003).

Sejak terbentuknya partai *Democratic Progressive Party* (DPP) pada tahun 1986 dan menjadi legal pada tahun 1989 (Eleanor, 2020). Keinginan Taiwan untuk berusaha memisahkan diri dari RRC dan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat semakin meningkat karena itu Taiwan berusaha melakukan berbagai usaha seperti mencari dukungan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, memberikan bantuan kepada PBB, melakukan hubungan dagang, dan lain sebagainya. Namun usaha-usaha ini selalu dihalang-halangi dan dipersulit oleh RRC, salah satunya dengan diterapkannya kebijakan *One China Policy* yang mana menyatakan bahwa hanya ada satu China yaitu Republik Rakyat China (RRC) dan Taiwan merupakan bagian dari RRC.

Akan tetapi perdebatan-perdebatan yang terjadi akhirnya membuat dua negara bertemu pada tahun 1992 yang kemudian membuahkan hasil '*The 1992 Consensus*' yang menyatakan tentang interpretasi dari *One China Policy*:

Both sides of the Taiwan Straits adhere to the principle of "one China", but the two sides attach different meanings to this. The Chinese Communist authorities regard "one China" to be "The People's Republic of China," and after unification, Taiwan would become a "Special Administrative Region" under its jurisdiction. Our side feels that "one China" should refer to the Republic of China, which was founded in 1912 and has continued to exist to the present; its sovereignty extends to the whole of China, but at present its governing power only extends to Taiwan, the Penghu Islands, Quemoy and Matsu. Taiwan is indeed part of China, but the mainland is also part of China (Teon, 2016).

1992 Consensus ini menyatakan bahwa hanya ada satu China tetapi kedua negara memiliki kebebasan untuk menginterpretasikannya definisi satu China sesuai dengan pandangan masing-masing. Disini RRC menginterpretasikannya sebagai hanya ada satu China yaitu RRC dan Taiwan merupakan bagian dari RRC sehingga reunifikasi antara RRC dan Taiwan merupakan sebuah tanggung jawab bagi semua masyarakat China (Dean, 2005). Sedangkan Taiwan juga mengakui adanya satu China akan tetapi Taiwan-lah yang merupakan perwakilan sah dari satu China.

Seiring dengan situasi politik dan pergantian pemerintahan Taiwan dan RRC serta meningkatnya demokrasi dan rasa nasionalisme yang tumbuh di Taiwan, pemahaman tentang *1992 Consensus* juga mengalami perubahan, seperti bagaimana presiden Tsai Ing-wen dengan tegas menolak adanya keberadaan konsensus 1992 ini dan menyatakan bahwa konsensus 1992 ini sebagai fakta sejarah (Glaser, 2016).

Pada awal masuknya partai nasionalis, Taiwan memiliki pemerintahan yang otoriter yang berarti hanya ada satu partai yang berkuasa yaitu partai nasionalis. Akan tetapi rakyat asli Taiwan merasa terkekang. Maka dari itu timbul banyaknya gerakan sosial, politik, serta demonstrasi yang terjadi demi membentuk Taiwan yang demokratis yang bilamana membuahkan hasil dengan dibentuknya Partai Progresif Demokratik atau dikenal sebagai *Democratic Progressive Party* (DPP) yang kemudian kini partai DPP menjadi partai kuat yang menjadi oposisi dari partai nasionalis hingga saat ini.

Perbedaan antara pemerintahan partai nasionalis dan partai DPP pun terlihat pada tahun 2013 yang mana pada saat itu Taiwan dipimpin oleh partai nasionalis dan pada tahun 2016 dipimpin oleh partai DPP yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap kebijakan luar negeri Taiwan terhadap RRC sehingga mengakibatkan juga perbedaan dan bagaimana sikap RRC dalam menanggapi seperti bagaimana partai DPP lebih cenderung pro-separatis sedangkan partai nasionalis lebih menghormati dan ramah terhadap sikap RRC.

Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada konflik yang terjadi antara Taiwan dan RRC yang berawal dari terjadinya *Chinese Civil War* yang memiliki berdampak hingga saat ini. Hal ini terlihat dari bagaimana banyaknya ketegangan-ketegangan hubungan yang terjadi antara Taiwan dan RRC. Pembahasan tesis ini akan berfokus pada perbedaan kebijakan luar negeri Taiwan dibawah dua kepemimpinan yang berbeda dan melihat bagaimana respon RRC terhadap kebijakan luar negeri dari pemerintah Taiwan. Penelitian ini mengambil waktu dari tahun 2013 sampai tahun 2018 dimana di dalam kurun waktu lima tahun ini ada pergantian rezim pemerintahan yang pertama dari partai nasionalis yang digantikan oleh partai DPP. Dari pergantian ini terlihat adanya perubahan yang signifikan pada kebijakan luar negeri yang diterapkan Taiwan dan respon RRC yang cukup berbeda pada periode tahun 2013-2018.

1.2 Perumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang diatas, permasalahan yang diajukan adalah:

1. Dalam konteks *One China Policy* apa perbedaan kebijakan luar negeri Taiwan dibawah kepemimpinan partai nasionalis atau *KuoMinTang* (KMT) dan dibawah pemerintahan partai *Democratic Progressive Party* (DPP)?
2. Bagaimana sikap Republik Rakyat China (RRC) menanggapi kebijakan luar negeri Taiwan dalam konteks *One China Policy* antara tahun 2013-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini yaitu:

1. Menjelaskan perbedaan kebijakan luar negeri yang diterapkan pemerintah Taiwan dalam dua rezim partai yang berbeda dalam konteks *One China Policy*.
2. Melihat respon RRC terhadap kebijakan luar negeri yang diterapkan Taiwan dalam konteks *One China Policy*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Peneliti, akan dapat lebih mengerti dan memahami secara mendalam terkait situasi dan kondisi di Taiwan dan hubungannya dengan RRC.
2. Bagi pembaca, akan memahami dinamika hubungan yang terjadi antara Taiwan dan RRC pada periode 2013-2018 dimana adanya perubahan yang cukup signifikan.

1.5 Sistematika Penulisan

Alur Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Pembatasan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Pada Bab Landasan Teoritis ini menjelaskan mengenai Kerangka Teoritis, Tinjauan Pustaka, Konsep dan Model Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab Metode Penelitian ini menjelaskan mengenai Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab Analisis dan Pembahasan ini menjelaskan mengenai gambaran Data Penelitian, Analisis Data dan Pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab Kesimpulan dan Saran ini diuraikan mengenai kesimpulan, saran dari hasil penelitian dan signifikansi penelitian.

Di bab berikutnya akan dijelaskan mengenai kerangka berpikir yang penulis gunakan di dalam thesis ini dan kajian pustaka yang membahas beragam studi yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai hubungan Taiwan dan RRC.

